

## Implementasi Kebijakan Pemekaran Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat

Suryadi Lambali<sup>1</sup>, Muhammad Rizal<sup>2</sup>, Nuralamsyah Ismail<sup>3</sup>, Rizal Fauzi<sup>4</sup>

<sup>1,3,4</sup>Departemen Ilmu Administrasi, Universitas Hasanuddin, Indonesia.

<sup>2</sup>Departemen Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin, Indonesia.

E-mail: surlam2006@yahoo.co.id<sup>1</sup>, nuralamsyahismail@unhas.ac.id<sup>3</sup>

### ARTICLE INFO

**Keywords:** Policy Implementation, Regional Expansion, Service Quality

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Pemekaran Daerah, Kualitas Pelayanan

**How to cite:** Lambali, S., Rizal, M., Ismail, N., & Fauzi, R. (2022). Implementasi Kebijakan Pemekaran Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 8(1), 59-75.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze and empirically test the fragmentation of policy implementation on the quality of health services in Mamasa District, West Sulawesi, research question is how much the effect of policy implementation fragmentation to quality health service in Regency of Mamasa in West Sulawesi. The Method in this Research used analyses quantitative with model of path analysis. Data obtained by through circulating of questionnaire to all policy implementor fragmentation and cervices health in Regency of Mamasa.*

*The Result of research to found that execution of policy implementation fragmentation as according to variabel exogen that is communications, resource, disposition or attitude, and the bureaucratic structure, and so that quality health service have as according to reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangible. The correlation influence of policy implementation fragmentation to quality health service, hence did not all of dimension from policy implementation fragmentation have an effect on significant to quality health service, so that create new models is to called as model struktur-3 where only have dimensions of resources, disposition or attitude, and structure of bureaucracy having an effect on significant. From model of this struktur-3 to created a model of policy implementation fragmentation can be influenced by consistency factor, authority, facilities, staffing the bureaucracy, incentive, and system operating procedure. Apart from the internal factor is influenced by environmental factor related to existence of conflict potency, leadership, elite figure, and the local culture.*

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris fragmentasi implementasi kebijakan terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat, pertanyaan penelitian adalah seberapa besar pengaruh fragmentasi implementasi kebijakan terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat. Metode dalam Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan model analisis jalur. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh fragmentasi pelaksana kebijakan dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamasa. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan fragmentasi implementasi kebijakan sesuai dengan variabel eksogen yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi, sehingga pelayanan kesehatan yang berkualitas telah sesuai dengan keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan berwujud. Adanya korelasi pengaruh fragmentasi implementasi kebijakan terhadap kualitas pelayanan kesehatan, maka tidak semua dimensi dari fragmentasi implementasi*

---

*kebijakan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan kesehatan, sehingga tercipta model baru yang disebut sebagai model struktur-3 dimana hanya memiliki dimensi sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi berpengaruh signifikan. Dari model struktur-3 ini hingga terciptanya model fragmentasi implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh faktor konsistensi, kewenangan, fasilitas, kepegawaian birokrasi, insentif, dan sistem operasi prosedur. Selain faktor internal dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang berkaitan dengan adanya potensi konflik, kepemimpinan, tokoh elit, dan budaya lokal.*

---

## Pendahuluan

Implementasi Kebijakan Pemekaran Kabupaten membawa dampak yang luas terhadap tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat khususnya dalam pelayanan kesehatan. Implementasi sebagai faktor penentu dalam keberhasilan suatu kebijakan berdampak pada ketidakberhasilan suatu kebijakan yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, struktur organisasi yang kurang memadai dan kurang efektif dan atau karena komitmen yang rendah di kalangan pelaksana. Implementasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemekaran Kabupaten, pengaruhnya sangat ditentukan oleh implementasi kebijakan. Implementasi itu sendiri mempunyai empat faktor atau variabel yang merupakan syarat-syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi. Edward (1980) mengemukakan bahwa ada empat faktor atau variabel dalam implementasi kebijakan publik yakni: *communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure*. Dalam tulisan ini, keempat faktor atau variabel inilah yang akan menjadi kriteria penting dalam implementasi kebijakan pemekaran Kabupaten.

Weick and Quinn (1999), berpendapat kebijakan pemekaran sebagai wujud restrukturisasi merupakan *focus on changing rather than change*. Upaya restrukturisasi yang dalam konteks pemekaran dilakukan oleh kepala daerah sebagai agen perubahan lebih fokus pada kegiatan perbaikan ketimbang pada dampak (hasil) perubahan sesuai kehendak masyarakat daerah. Padahal, perkembangan dalam bentuk pemekaran wilayah menurut Sutojo (2015) merupakan wujud dari keinginan masyarakat pada suatu daerah sebagai upaya pertumbuhan dan perkembangan dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan, dalam dimensi geografis. Maraknya pemekaran daerah disebabkan karena mudahnya persyaratan pemekaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah. Selanjutnya, karena dianggap tidak relevan lagi, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Kehadiran Peraturan Pemerintah ini memiliki dasar atas Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Langkah pemerintah yang berinisiatif untuk terus menyempurnakan peraturan pemerintah tersebut terlihat yang kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dampak dari maraknya pemekaran Daerah ini di Indonesia ialah pemerintah mencoba membatasi pemekaran daerah dan hanya memberikan kelonggaran pada wilayah-wilayah yang dianggap relevan untuk dikembangkan daerahnya seperti di Papua. Prosedur kebijakan pemekaran Daerah dapat mengakomodir dan berupaya untuk menyeimbangkan dua pendekatan yakni *bottom up* dan *top down*. Berdasarkan fakta secara empiris dilapangan memperlihatkan bahwa pemekaran lebih banyak menggunakan pendekatan *bottom-up* yang diusulkan melalui pintu lembaga legislatif sehingga kurang mempertimbangkan kebijakan Nasional yang bersifat *top-down*.

Maraknya pemekaran Daerah menyebabkan perkembangan jumlah Kabupaten/Kota dan provinsi menjadi tidak terkendali, yang akan mengakibatkan pertumbuhan daerah otonom baru secara signifikan, pada gilirannya akan berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara, jika tidak diimbangi dengan perbaikan secara kelembagaan sistem pemerintahan terutama dengan memperhatikan faktor-faktor yang dominan terhadap implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Padahal jika ditarik lebih fundamental, hal tersebut diatas harusnya tetap pada upaya pemerintah Dalam mewujudkan kesejahteraan yang disetiap negara akan menemui dua hal yang berbeda corak yaitu bentuk *state efficiency* yang bercorak sentralisasi dan *Local Democracy* yang bercorak desentralisasi (Waskitawati, 2018). Cheema dan Rondinelli (1983) mengemukakan, desentralisasi dianggap penting untuk dijadikan pilihan dalam implementasi pemerintahan, karena melalui desentralisasi tersebut akan dapat meningkatkan efektivitas dalam membuat kebijaksanaan nasional dengan cara mendelegasikan tanggungjawab yang lebih besar kepada para pejabat tingkat lokal untuk merancang proyek-proyek pembangunan, agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

Kejelasan sistem komunikasi yang mengarah pada apa yang seharusnya dikerjakan dapat ditransmisikan kepada seluruh pegawai ataupun pelaksana kebijakan tersebut. Sehingga faktor sumber daya juga menjadi penentu dalam konteks pegawai yang tepat dengan keahlian yang sesuai dan diperlukan. Hal tersebut tentunya perlu didukung dengan informasi yang relevan tentang tata cara mengimplementasikan kebijakan, dengan disposisi atau sikap dari implementor yang mengetahui apa yang harus dilaksanakan. Menurut Edward (1980), juga diperlukan kehendak atau keinginan implemetor atau sering disebut dengan disposisi. Jika sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan dan implementor tahu apa yang akan dikerjakan dengan struktur birokrasi yang mengembangkan standar operating prosedur dari pelaksanaan kebijakan.

Fakta di lapangan memperlihatkan adanya pertumbuhan daerah pemekaran terus meningkat, yakni jumlah Provinsi yang diawal hanya berjumlah 26 Provinsi berkembang menjadi 37. Penambahan terakhir 3 provinsi baru di Papua, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan yang berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Gambaran tersebut diatas

merupakan pengembangan daerah otonom yang dominan berkembang di luar pulau Jawa sekitar 95 (persen). Sebaran daerah otonom baru tersebut terbanyak di pulau Sumatera yang terjadi peningkatan 36,31% (persen), pulau Sulawesi sebesar 17,32% (persen), lalu Papua dan pulau Kalimantan, selebihnya tersebar di Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku, serta pulau Jawa masing-masing 9 daerah otonom baru atau peningkatan hanya 5,03% (persen), Sehingga total pemekaran Daerah seluruhnya sebanyak 179 Daerah otonom baru (Data berdasarkan laman website Sekretariat Kabinet Republik Indonesia setkab.go.id: diakses pada 15 November 2022).

Dengan adanya sejumlah pemekaran Kabupaten/Kota dan Provinsi membuat sistem pemerintahan menjadi lebih beragam dan menjadi sebuah permasalahan baru dalam manajemen pemerintahan. Salah satu Kabupaten yang mekar berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2002 adalah Kabupaten Mamasa (pada waktu itu masih dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan). Kabupaten Mamasa menjadi Kabupaten Baru akibat dari pemecahan dari Kabupaten Polewali Mamasa (Polmas) sebelum Provinsi Sulawesi Selatan mekar menjadi dua Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (sekarang Kabupaten Mamasa masuk dalam Provinsi Sulawesi Barat).

Fenomena tersebut diatas tentunya menunjukkan produktifitas pembentukan daerah otonom sangat besar, namun kondisi tersebut ditata kembali oleh pemerintah melalui moratorium pemekaran daerah yang sebagian besar bermasalah melakukan evaluasi, supervisi, dan pembenahan yang diperlukan (Akbar, 2017; Ratnawati, Afadlal, & Nyimas, 2009). Dampak dari Fenomena ini, tentu saja memberikan kekhawatiran terhadap kesiapan layanan kesehatan secara empiris dapat terlihat bahwa banyaknya lembaga pelayanan kesehatan masyarakat belum dapat memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat terutama pada daerah otonom yang baru. Masih kurangnya tenaga pelayanan masyarakat, struktur birokrasi yang kaku, dan layanan yang tidak memihak kepada masyarakat terutama pada masyarakat yang kurang mampu dalam ekonomi. Padahal menurut Cohen dan Peterson (1997) berpendapat bahwa dengan meningkatkan jumlah dan keragaman lembaga yang menyediakan layanan, tidak hanya akuntabilitas yang akan meningkat, tetapi pemberian layanan akan dikelola dengan lebih baik dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menuturkan bahwa terdapat jenis pelayanan publik sebanyak 365 macam, mulai dari surat kelahiran hingga surat kematian. Berdasarkan jumlah jenis layanan tersebut maka pemerintah memberikan standardisasi beberapa jenis layanan Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Nomor: SE/10/M.PAN/07/2005 telah menekankan bahwa terdapat sebelas sektor layanan dan empat puluh satu jenis layanan. Sektor layanan tersebut menyangkut sektor :

1. Administrasi kependudukan
2. Kepolisian
3. Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi

4. Bea Cukai dan Pajak
5. Kesehatan, yang meliputi jenis layanan: Rumah Sakit, Puskesmas, dan Posyandu
6. Imigrasi
7. perhubungan
8. Ketenagakerjaan
9. Pertanahan dan Permukiman
10. Pendidikan
11. Penanaman Modal

Beberapa masalah utama yang nampak dalam pelaksanaan pemekaran Daerah terhadap sistem pemerintahan dapat dibagi dalam dua kelompok besar, pertama adalah berkaitan dengan transformasi konsep kebijakan terhadap para pelaksana di daerah mengenai sistem pemerintahan, dan yang kedua adalah Implementasi kebijakan sistem pemerintahan tersebut terhadap pelaksanaan kebijakan pada daerah-daerah khususnya di wilayah pemekaran Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Padahal, Layanan kesehatan pada saat ini semakin dinamis dan kompetitif. Persaingan di bidang layanan kesehatan juga meningkat, hal itu tampak pada tiap lembaga penyedia layanan kesehatan bersaing untuk memberikan pelayanan terbaik (Izadi et al., 2017; Kitapci et al., 2014). Layanan kesehatan yang bersifat intangible mulai diwujudkan dengan membuat bangunan yang representatif, sarana dan prasarana kesehatan yang lengkap, tenaga medis yang terpercaya, profesional, dan kompeten sampai detail lengkap tentang urusan kesehatan juga mulai diperhatikan oleh pengelola layanan (Kartikasari et al., 2014).

Dalam kenyataan yang ada di lapangan terlihat adanya beberapa hal yakni: *Pertama*, Implementasi kebijakan pemekaran Daerah terhadap pelaksanaan di Daerah belum mempunyai suatu model yang standar dalam sistem pemerintahan di daerah. *Kedua*, tidak adanya suatu sistem yang mengatur dalam implementasi kebijakan untuk menangani sistem pemerintahan daerah, sehingga transformasi kepemimpinan manajemen pemerintahan tidak sampai pada arus implementasi pada level bawah di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi khususnya pada pemekaran Daerah Kabupaten yang ada di tingkat perkotaan, Kabupaten-kabupaten, serta Provinsi. *Ketiga*, tidak tersedianya sumber daya birokrasi yang kapabilitasnya terpenuhi sesuai dengan standardisasi, sebagai sarana transformasi kebijakan pemekaran Daerah menjadi lebih praktis dalam pelaksanaan pelayanan publik pada Masyarakat yang ada pada Kabupaten, Kota, dan Provinsi Pemekaran.

Agar berhasil, dikatakan bahwa desentralisasi harus berakar pada institusi pemerintahan lokal dan partisipatif yang berfungsi (Hadiz, 2010). Namun, Sutiyo (2014) bahwa tantangan utama pelaksanaan desentralisasi di banyak negara berkembang adalah bahwa modal sosial tidak dapat segera diciptakan, melainkan merupakan produk interaksi lama yang telah mengakar dalam sejarah masyarakat. Gambaran masalah secara umum tersebut dapat di elaminir menjadi permasalahan

dalam sebuah kajian Implementasi Kebijakan pemekaran Daerah Sehingga yang menjadi alasan dalam pemilihan judul penulisan penelitian ini adalah:

1. Kinerja daerah hasil pemekaran belum berjalan baik karena belum terlihat adanya perubahan sesuai dengan tujuan pemekaran, yakni untuk mendekatkan layanan pemerintahan kepada masyarakat dalam rangka perbaikan dan pembangunan masyarakat yang disebabkan oleh sumber daya birokrasi yang tidak memadai.
2. Belum terlihat adanya transformasi implementasi kebijakan pemekaran daerah dalam rangka peningkatan layanan pemerintahan untuk mendekatkan sentra-sentra layanan publik kepada masyarakat.
3. Belum terlihat adanya tanda-tanda peningkatan perbaikan dalam implementasi kebijakan pemekaran daerah dalam implementasi kebijakan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.

Dalam aspek yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan seperti yang dijelaskan oleh Pohan (2007) bahwa "layanan kesehatan yang kurang atau tidak bermutu biayanya mahal". Sehingga beberapa fenomena kualitas layanan kesehatan sangat tergantung dari berapa besar pengaruh dari implementasi kebijakan pemekaran yang menekankan pada mendekatkan layanan kepada masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Kualitas layanan kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten dan kota memperlihatkan beberapa fenomena layanan antara lain :

1. Layanan kesehatan tidak atau belum berupaya untuk memenuhi harapan masyarakat yang mengarah pada kualitas pelayanan yang berkaitan dengan keterandalan layanan kesehatan masyarakat.
2. Belum terlihat adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk memberikan jaminan layanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan keinginan masyarakat di daerah pemekaran.
3. Belum terlihat adanya peningkatan kualitas pelayanan oleh pemerintah daerah dalam melengkapi sarana dan prasarana kesehatan yang mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat baik dari segi sarana prasarana, komputersisasi administrasi, dan informasi layanan kesehatan yang handal.
4. Belum adanya cerminan kualitas layanan kesehatan dalam rangka meningkatkan kepuasan kerja, komitmen dan moral profesi layanan kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten/kota.

Dari gambaran permasalahan tersebut di atas maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah: berapa besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemekaran Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten/Kota.

## Metode Penelitian

Sifatnya penelitian adalah struktur logika deduktif dengan *verification research* dengan menguji kerangka berpikir (*logical construct*) yang dibandingkan dengan data dan informasi yang diperoleh di lapangan melalui kuesioner, maka diperlukan suatu desain penelitian yang memerlukan sesuai dengan kondisi kedalaman penelitian yang dilakukan di Kabupaten Mamasa, dengan pemaduan analisis menggunakan perangkat lunak SPSS dengan model analisis jalur (*path analysis*).

Konsep kebijakan pemekaran pemerintahan adalah merupakan suatu konsep yang dalam mengimplementasikannya sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi yang saling berhubungan dan berpengaruh antara yang satu dengan lainnya. Ini merupakan subsistem yang dapat menjadi dominan dalam implementasi kebijakan dan saling mempengaruhi antara yang satu dengan lainnya. Konsep Pemekaran pada Sistem Pemerintahan disini dimaknai sebagai suatu wilayah dapat berkembang menjadi dua atau lebih Kabupaten/Kota ataupun Provinsi ataupun sebaliknya, yang kemudian menjadi daerah otonom baru dengan sistem pemerintahan sendiri-sendiri dan terpisah dari induknya atau bersatu/bergabung dengan daerah yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan masyarakat adalah Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat baik berupa kegiatan peningkatan/promotif kesehatan, pencegahan/preventif dan penyembuhan penyakit, serta pemulihan/rehabilitatif penyakit yang dilakukan oleh institusi pelayanan kesehatan di wilayah kabupaten pemekaran. Sarana pelayanan kesehatan tersebut meliputi Rumah Sakit, Puskesmas dan Posyandu.

Populasi dibagi dalam beberapa bagian sebagai sumber data dalam penelitian ini yang diperoleh dari responden karena itu populasi penelitian ini adalah para pelaku dalam sistem pemerintahan di Daerah, mereka yang mengetahui dan terlibat dalam implementasi kebijakan pemekaran pemerintahan di Kabupaten Mamasa. Tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Mamasa yang meliputi : Pemuka agama, Tokoh adat, dan Tokoh Politik. Sedangkan Implementor yang terkait dalam kebijakan pemekaran pemerintahan yang ada di Kabupaten Mamasa dimasing-masing Instansi yang memiliki struktural dalam pemerintahan dengan menjabat sebagai eselon II, III, dan IV. Alasan pemilihan implementor untuk dijadikan sebagai responden karena para implmentor adalah yang paling memahami bagaimana kebijakan pemekaran di implmentasikan dalam *Policy Implementation*. Besaran sample 250 responden dari 669 populasi penelitian. Teknik yang digunakan menganalisis data dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan *path analysis* (Analisis Jalur) dengan melihat pengaruh (efek) secara langsung dan tidak langsung dari variabel implementasi kebijakan pemekaran dan variabel kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Mamasa.

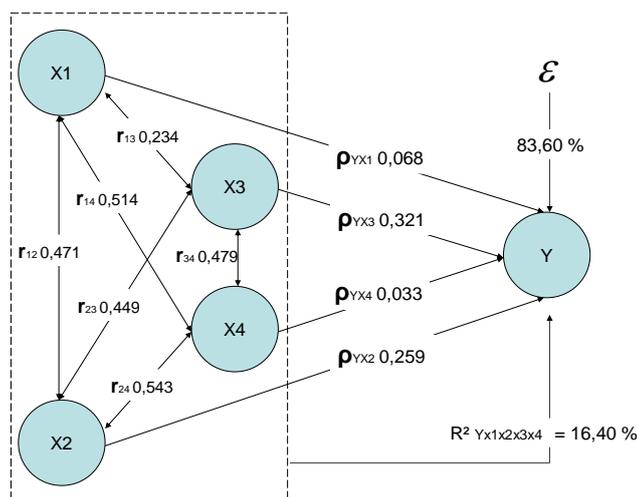
## Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan implementasi kebijakan pemekaran daerah sesuai dengan masing-masing indikator variabel penelitian yang diurai dalam pernyataan-pernyataan yang telah diedarkan kepada responden sebagai implementor pada daerah pemekaran

semuanya telah berjalan dengan baik dan tingkat kesahihan dari masing-masing indikator telah diujikan dan dapat berjalan dengan baik. Variabel-variabel tersebut baik berkaitan dengan implementasi kebijakan pemekaran maupun variabel kualitas pelayanan kesehatan semuanya telah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat dan implementor di Kabupaten Mamasa.

Setelah dihubungkan kedua variabel tersebut dan diuji berdasarkan tingkat besaran dari pengaruh baik secara langsung maupun secara parsial tentang variabel implementasi kebijakan pemekaran terhadap kualitas pelayanan masyarakat ternyata korelasinya secara bersamaan hanya mencapai 16,40% (persen). Untuk pembuktian tersebut akan dilakukan pengujian terhadap variabel eksogen yang terdiri dari variabel-variabel yang diasumsikan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan sebagai variabel endogennya.

Dengan gambaran hasil pengujian secara keseluruhan maka didapatkan kerangka hubungan kausal empiris dari masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Struktur-2

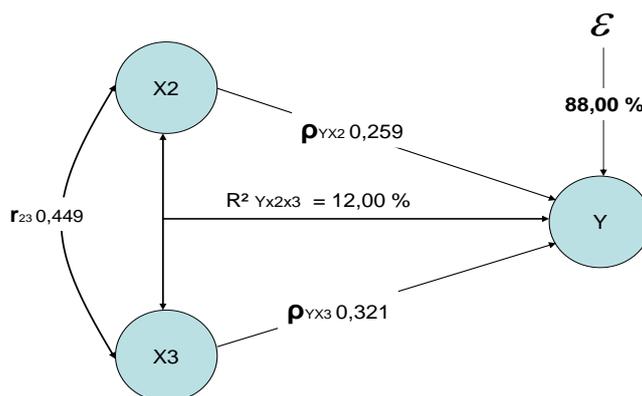
Jika melihat gambaran implementasi kebijakan pemekaran yang ada di Kabupaten Mamasa dengan hasil penelitian yang ada dapat digambarkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan telah berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat karena terlihat hasil persentase penilaian dari pelaksanaan kebijakan pemekaran seluruhnya berada di atas angka 70% (persen) yang menunjukkan bahwa telah berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan masyarakat. Tetapi jika dilakukan korelasi diantara keempat variabel dari implementasi yaitu komunikasi, resources, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi maka terlihat bahwa korelasi dari masing-masing variabel tersebut tidak dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel berkorelasi secara signifikan diantara masing-masing keterhubungan antara variabel yang satu dengan lainnya. Namun kenyataannya setelah diimplementasikan dalam kebijakan pemekaran tidak seluruhnya variabel tersebut dapat saling mempengaruhi antara setiap variabel dalam implementasi. Ini menunjukkan bahwa

semua instansi yang ada dalam lingkungan otonomi daerah sebagai daerah yang baru cenderung setiap instansi dan dinas maupun badan yang ada di daerah pemekaran cenderung berjalan secara parsial sehingga tidak mempunyai keterhubungan antara lembaga pemerintah yang satu dengan lainnya. Hal ini sering digambarkan sebagai arogansi setiap lembaga pemerintahan yang ingin memperlihatkan bahwa setiap lembaga mempunyai posisi yang sangat penting dalam mensukseskan jalannya implementasi pemekaran daerah. Akibat dari arogansi yang dimiliki setiap lembaga menimbulkan tidak adanya komunikasi di antara setiap lembaga pemerintahan sebagai jalur untuk menyamakan persepsi dalam menjalankan sistem pemerintahan otonomi daerah sebagai daerah pemekaran yang baru. Arogansi tersebut dapat diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain adalah ada lembaga pemerintah yang merasa bahwa lembaganyalah yang paling penting karena paling banyak memiliki dana dalam implementasi program pemekaran, namun ada instansi yang merasa sangat penting karena apabila tidak melalui lembaga tersebut maka semua kebijakan tidak dapat dijalankan tanpa adanya disposisi dari lembaga tersebut. Sehingga seluruh bagian dan instansi yang ada berjalan secara parsial tanpa menghiraukan lembaga-lembaga lainnya.

Disisi yang lain juga disebutkan oleh Edward (1980) bahwa semua kebijakan yang baru sulit untuk di implementasikan secara maksimal, ini terbukti dalam implementasi kebijakan pemekaran. Sebagai kebijakan baru yang harus membentuk daerah baru, kepemimpinan baru ternyata akan membawa dampak yang tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan implementasi kebijakan pemekaran. Sulitnya implementasi kebijakan pemekaran terlaksana dengan baik sesuai dengan korelasi di antara seluruh variabel dapat diakibatkan oleh faktor-faktor yang lain diantaranya adalah adanya potensi konflik dari elit-elit politik yang tergabung dalam area baru sebagai daerah otonom baru yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri sebagai daerah otonom tentunya masih mempunyai kekuarangan dalam seluruh aspek yang dapat mendukung terlaksananya dengan baik seluruh variabel dari implementasi dan saling keterkaitan antara variabel satu dengan lainnya. Tentunya ini semua berkaitan dengan implementor yang tersedia yang dapat dikaikan dengan sarana prasarana yang tersedia. Implementor yang tersedia cenderung tidak memenuhi kriteria sebagai implementor dalam menjalankan tugasnya, baik diakibatkan karena tingkat pendidikan yang dimiliki, keahlian dalam bidang administrasi publik dan pemerintahan, *Skill* yang tidak mendukung. Ini semua mengakibatkan tidak terjadinya korelasi di antara semua variabel implementasi, seperti yang dikemukakan oleh Edward bahwa *critical factor* dari implementasi dapat saling mempengaruhi sesuai dengan keterhubungan di antara variabel-variabel tersebut.

Dengan menggunakan analisis jalur *model strimming* maka didapatkan bahwa model struktur-1 menunjukkan bahwa dimensi-dimensi yang ada tidak semuanya signifikan mempengaruhi kualitas pelayanan. Sehingga *model trimming* digunakan untuk memperbaiki suatu model analisis jalur dengan cara mengeluarkan dari model eksogen yang koefisien jalurnya tidak signifikan terhadap variabel endogen. Ini terjadi ketika koefisien jalur diuji secara keseluruhan dan ternyata ada variabel yang tidak signifikan, maka diharuskan menghitung ulang koefisien jalur tanpa

menyertakan variabel eksogen yang koefisien jalurnya tidak signifikan. Maka dengan demikian didapatkanlah sebuah struktur baru dengan konsep hipotesis persamaan struktural-2 yang didasarkan pada hasil perhitungan SPSS dinyatakan bahwa secara otomatis dalam perhitungan koefisien korelasi yang memiliki tanda \*\* (bintang dua) maka variabel tersebut signifikan terhadap 2-tailed. Dengan demikian kedua variabel tersebut dijadikan sebagai model struktur-2 sesuai dengan variabel yang dianggap mempunyai signifikansi terhadap variabel kualitas pelayanan. Dengan menghitung dan memasukkan dalam struktur model yang didapatkan maka terdapat model struktur-2 sebagai berikut :



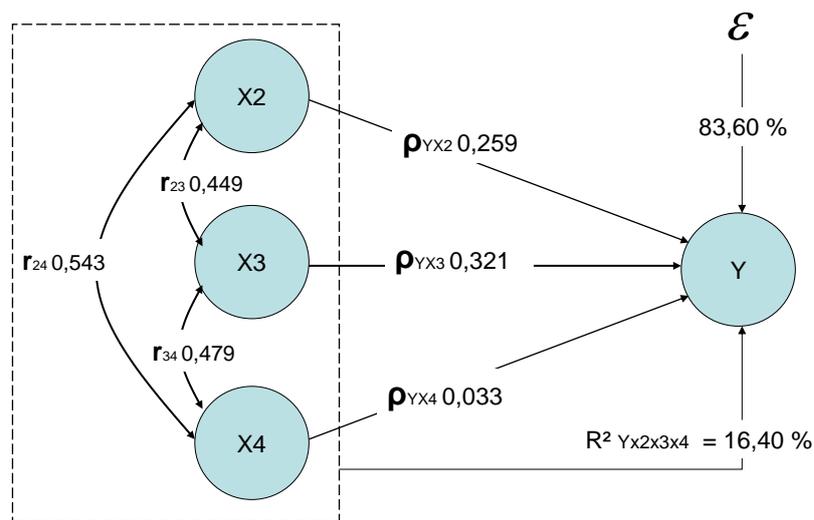
Gambar 2. Model Struktur-2

Jika model struktur-2 dijadikan dasar sebagai sebuah model baru dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pemekaran daerah maka dapat dijelaskan bahwa variabel sumber daya dan struktur birokrasi berkontribusi secara signifikan dan simultan terhadap kualitas pelayanan, walaupun besaran korelasi terhadap variabel endogen hanya seperlima dari jumlah seluruh variabel yang mempengaruhinya atau masih ada empat kali lipat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi variabel pelayanan. Dalam implementasi kebijakan pemekaran sebenarnya sumber daya tidak secara langsung mempengaruhi implementasi, karena itu peran komunikasi adalah sangat penting sebagai sebuah variabel yang dapat menjembatani seluruh variabel-variabel yang dianggap sebagai faktor penentu dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Sumber daya sebenarnya dijembatani oleh komunikasi untuk dapat lebih bersinergi dengan variabel disposisi atau sikap dari para implementor, namun dalam penelitian ini tidak nampak adanya keterhubungan dari variabel komunikasi untuk menjembatani variabel disposisi atau sikap dikarenakan adanya faktor lingkungan yang dimainkan oleh para elit politik dan eliti pemerintahan dalam menjalankan sistem pemerintahan.

Model struktur-2 ini sebenarnya adalah model yang sangat simple dalam menjalankan sistem administrasi pemerintahan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat demi mempercepat terciptanya kemakmuran sesuai dengan isi dan bunyi undang-undang pemekaran daerah bahwa melalui pendekatan atau mendekatkan layanan kepada masyarakat akan mempercepat terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Model inilah yang sebenarnya dapat dilihat bahwa di Kaupaten Mamasa terbentuk model yang sangat sederhana karena hanya dua faktor

fariabel penentu yang dapat secara signifikan mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Jika ini ingin di kembangkan lebih jauh maka tentunya konsep model ini dapat dikembangkan ke dalam sebuah model yang didalamnya masih ada faktor lingkungan lain yang mempengaruhinya.

Jika melihat hasil analisis SPSS dengan tingkat korelasi yang signifikan dengan tanda yang diberikan dua bintang (\*\*) maka hanya dua variabel yang berpengaruh secara signifikan yaitu variabel sumber daya ( $X_2$ ) dan disposisi atau sikap ( $X_3$ ). Tetapi setelah dilakukan uji secara individual dari masing-masing variabel eksogen, maka ternyata ada tiga variabel yang dianggap signifikan yaitu variabel sumber daya ( $X_2$ ), variabel disposisi atau sikap ( $X_3$ ), dan variabel struktur birokrasi ( $X_4$ ). Sesuai dengan petunjuk dalam analisis path bahwa variabel yang tidak memiliki pengaruh secara individu sebaiknya dikeluarkan dan kemudian di uji kembali sesuai dengan variabel yang dinyatakan signifikan secara individu atau sendiri-sendiri. Dari gambaran ini maka dibuatlah model baru yang ketiga yaitu model struktur-3.



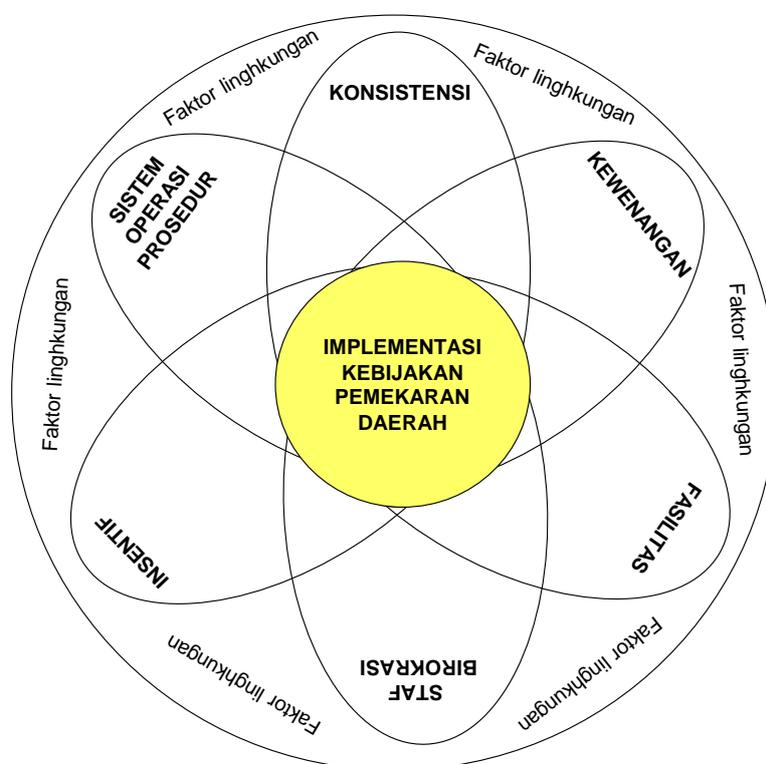
Gambar 3. Model Struktur-3

Setelah melakukan uji korelasi dengan menggunakan alat bantu perangkat lunak SPSS, dengan menggunakan model pengaruh implementasi kebijakan pemekaran terhadap kualitas pelayanan dengan hasil uji statistik ternyata model jalur dari masing-masing variabel eksogen antara lain variabel komunikasi ( $X_1$ ), variabel sumber daya ( $X_2$ ), variabel disposisi atau sikap ( $X_3$ ), dan variabel struktur birokrasi ( $X_4$ ) terhadap variabel endogen yaitu variabel kualitas pelayanan (Y), ternyata tidak semua variabel dapat signifikan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan, walaupun dalam kebijakan pemekaran daerah yang disebutkan dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Semua peraturan dan kebijakan yang

dibuat tersebut mempunyai tujuan utamanya adalah mendekatkan layanan kepada masyarakat ternyata signifikansi pengaruhnya hanya 16,40 %. Dengan menggunakan *path analisis* (analisis jalur) dengan model Trimming maka didapatkan model struktur-2 yaitu hanya memasukkan variabel sumber daya ( $X_2$ ), dan variabel disposisi atau sikap ( $X_3$ ) pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan (Y), ternyata pengaruhnya hanya sebesar 12 % saja dan sisanya sebesar 80 % sebagai variabel endogen cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain dari kualitas pelayanan.

### Temuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan kepada responden sebagai implementor yang ada di Kabupaten pemekaran baru maka kelompok-kelompok pernyataan yang ada dan mempunyai pengaruh signifikan antara lain: konsistensi, *authority*, *facilities*, *staffing the bureaucracy*, *incentive*, *standar operating prosedur*, dan fragmentasi. Dari variabel baru yang berpengaruh tersebut disimpulkan sebuah model temuan yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan pemekaran dipengaruhi oleh faktor konsistensi, *authority*, *facilities*, *staffing the bureaucracy*, *incentive*, *standar operating prosedur*, dan fragmentasi. Sebagai sebuah model baru dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Model Implementasi Kebijakan Pemekaran

Konsistensi informasi sangat tergantung pada peran para implementor dengan kemampuan dalam bertindak cepat dalam mengawali sistem komunikasi. Maka dari itu implementor yang konsisten dalam menjalankan sistem komunikasi kebijakan pemekaran haruslah memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi segala permintaan masyarakat dalam rangka memperlancar jalannya sistem pemekaran daerah. Meskipun tentunya ditemukan adanya kompleksitas permasalahan yang begitu rumit untuk mengimplementasikan kebijakan pemekaran, namun diharapkan semua implementor tidak salah dalam menilai program-program yang baru yang mempunyai kaitan dengan implementasi kebijakan pemekaran. Akhirnya, agar implementasi sebuah kebijakan dapat berjalan dengan baik maka semua pelaksana perlu selalu membuat adanya tujuan-tujuan kebijakan pemekaran yang minim perubahan-perubahan dalam menjalankan peran implementor.

Kewenangan (*Authority*) merupakan variabel baru yang kedua berpengaruh terhadap kebijakan pemekaran daerah. Kewenangan yang diberikan kepada implementor biasanya cukup memberikan bantuan kepada setiap individu atau pemerintah pada level yang lebih rendah untuk dapat bertindak dalam rangka implementasi kebijakan pemekaran. Kewenangan dalam hal ini adalah bagaimana memberikan kepada setiap pegawai agar memiliki kewenangan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, sehingga kewenangan-kewenangan yang ada harus dibuat dalam bentuk tertulis agar kesiapan dalam mengamalkan kewenangannya dapat menjadi lebih terarah sesuai dengan petunjuk yang tertulis. Namun dengan terbatasnya kewenangan dapat membuat tidak kreatif seseorang dalam menjalankan tugasnya untuk itu apabila ada seorang pegawai yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik seharusnya dikenakan sanksi.

*Facilities* adalah merupakan gambaran dari setiap implementor untuk selalu tersedianya fasilitas yang dibutuhkan untuk memperlancar jalannya implementasi kebijakan. Fasilitas fisik dapat juga menjadi sumber kritis dalam mengimplementasikan kebijakan pemekaran. Walaupun implementor memiliki jumlah staf yang cukup dalam mengamalkan tugasnya, namun tanpa bangunan yang diperlengkapi fasilitas seperti peralatan, persediaan, termasuk ruang hijau maka belum tentu dapat berhasil. Untuk itu fasilitas yang dibutuhkan harus sudah sesuai dengan kebutuhan pemekaran daerah, sarana bangunan perkantoran daerah sudah memadai untuk menunjang tercapainya tujuan pemekaran daerah. Perlengkapan perkantoran dapat menunjang seluruh aktivitas dalam menjalankan tugas pemekaran daerah termasuk jumlah perlengkapan fasilitas harus cukup memadai yang dapat berupa tanah, bangunan, untuk itu semua harusnya tidak terdapat pembatasan anggaran dalam menjalankan pemekaran pemerintahan di daerah.

*Staffing the bureaucracy* adalah bagaimana pemerintah daerah dapat menentukan dan menyiapkan staf birokrasi yang ada di daerah pemekaran. *Staffing the bureaucracy* dapat menimbulkan rintangan yang serius apabila personel yang ada tidak mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan keinginan para manajemen paling atas yang ada di daerah pemekaran. Maka dari itu, seharusnya staf yang berada pada *lower management* selalu responsif terhadap apa keinginan dari para pimpinan yang ada. Sehingga perlu mempertimbangkan pengangkatan eksekutif,

sistem pelayanan sipil, sistem personalia, dan metode perekrutan personalia yang baku. Untuk mengimplementasikan kebijakan pemekaran setiap personalia diharapkan mempunyai ketersediaan waktu bagi pelaksana untuk keputusan yang mendukung jalannya sistem administrasi pemerintahan, menghindari ketidakpercayaan dalam menjalankan sistem pemerintahan, karena itu setiap staf memerlukan adanya persyaratan pelayanan yang tidak mengesampingkan waktu dinas. Dalam tulisan ini juga menggarisbawahi bahwa memang disadari oleh para staf yang ada di daerah pemekaran bahwa sulit rasanya melaksanakan setiap program yang dianggap baru.

*Incentive* atau dikenal dengan istilah sistem insentif yang senantiasa dapat mempengaruhi perilaku implementor dalam menjalankan tugasnya. Karena itu sering didapatkan adanya kebijakan yang memanipulasi insentif untuk dapat mempengaruhi implementasi. Insentif dianggap perlu untuk selalu dapat memajukan implementasi kebijakan pemekaran daerah dan beberapa penghargaan yang diperlukan terhadap pelaksana-pelaksana yang ada di daerah pemekaran. Sistem promosi diperlukan dalam kebijakan pemekaran, control untuk dapat meningkatkan sistem insentif untuk dapat melakukan pekerjaannya, karena itu setiap pekerjaan senantiasa dikaitkan dengan sanksi yang negatif terhadap bawahan karena itu diperlukan pengukuran kinerja yang harus sejalan dengan pemberian insentif, dan insentif dapat dikatakan sebagai ukuran untuk mengejar tujuan dalam menjalankan sistem pemekaran daerah.

*System operating procedure* atau sering disingkat dengan SOP adalah pekerjaan rutin yang memungkinkan para pejabat publik untuk membuat berbagai keputusan setiap hari. SOP yang berjalan dengan baik maka akan dapat menghemat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rutin dalam mengimplementasikan kebijakan pemekaran daerah, peranan struktur organisasi sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan, adanya kejelasan standar prosedur pelaksanaan kebijakan, kejelasan prosedur pembuatan keputusan, serta kecocokan tanggung jawab dengan implementasi kebijakan pemekaran. SOP perlu setiap saat di evaluasi agar selalu mendapatkan pembaharuan standar pelayanan dengan selalu mempertimbangkan waktu dalam setiap standar prosedur yang dibuat. Karena itu setiap kebijakan pemekaran daerah harus selalu fleksibel dalam menentukan pelaksanaan implementasi kebijakan pemekaran.

Fragmentasi adalah salah satu variabel yang juga berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pemekaran. Namun dalam hasil uji korelasi dari fragmentasi terhadap kualitas pelayanan adalah berlaku negative atau berbanding terbalik dengan kualitas pelayanan, artinya adalah semakin diperbaiki fragmentasi di daerah pemekaran maka akan semakin menjadi kurang baik kualitas pelayanan di daerah kabupaten pemekaran. Fragmentasi ini berkaitan dengan struktur birokrasi sebagai tahapan kekuatan untuk mencapai tujuan kebijakan pemekaran, tujuan secara substansial sebagai prioritas program dari pemekaran daerah, karena itu pengaruh struktur birokrasi harus didukung oleh peraturan yang telah ada di daerah pemekaran, tahapan ini harus jelas sehingga dapat menghindari pemborosan dana dan waktu dalam pelaksanaannya, sehingga tahapan-tahapan implementasi kebijakan pemerintahan memenuhi syarat yang ditentukan implementor. Karena itu

dalam hal ini fragmentasi sulit dimasukkan sebagai variabel pengaruh terhadap kualitas pelayanan pada daerah pemekaran karena dapat berbanding terbalik dari pengaruh yang ada.

Dengan melihat karakter daerah pemekaran yang diteliti maka ada beberapa potensi yang tidak penuh dalam variabel-variabel penelitian ternyata implementor yang ada di Kabupaten pemekaran memperlihatkan adanya kemungkinan pengaruh yang lain yang lebih potensial terhadap pengaruh dalam implementasi kebijakan pemekaran. Dari model dan bentuk implmentasi kebijakan yang ada dengan model baru yang ditemukan sebagai faktor yang mempengaruhi daerah pemekaran yang ada di Kabupaten Mamasa. Jika ditelusuri lebih mendalam maka sebenarnya masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pemekaran daerah yang jumlahnya cukup besar yaitu sebesar 83,60% (persen). Dari penelusuran data dan hasil pengamatan yang ada dilapangan pada saat melakukan penelitian pada daerah pemekaran, maka dapat ditambahkan bahwa masih ada pengaruh lingkungan yang mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan pemekaran terhadap kualitas pelayanan yang ada di daerah pemekaran. Dari penelusuran yang dicoba untuk direka dalam implementasi kebijakan adalah faktor lingkungan potensi konflik di daerah pemekaran, faktor kepemimpinan, peran tokoh masyarakat, dan budaya lokal yang dapat menerima setiap adanya perubahan di daerah pemekaran.

## Kesimpulan

Dari hasil penelitian diketahui bahwa besarnya pengaruh implmentasi kebijakan pemekaran daerah terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamasa ditentukan oleh *critical factor* komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi berkorelasi secara signifikan. Dari keempat faktor tersebut yang sangat besar pengaruhnya adalah disposisi atau sikap yang disusul dengan faktor sumber daya. Sedangkan faktor yang terkecil pengaruhnya adalah struktur birokrasi.

Hasil strimming dalam uji korelasi Implementasi kebijakan pemekaran terhadap kuliats pelayanan yang tadinya dapat dipengaruhi sepenuhnya oleh *critical faktor* komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi secara efektif terhadap kualitas pelayanan kesehatan, tetapi dengan menggunakan analisis strimming hanya *critical faktor* sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi yang berkorelasi signifikan terhadap kuoliatas pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dalam daerah otonom baru hanya efektif dipengaruhi secara signifikan oleh tiga faktor kritis tersebut.

## Saran

Adapun yang disarankan dalam penelitian ini adalah :

1. Dengan maraknya pemekaran daerah yang akhir-akhir ini tidak dapat terbendung karena adanya aspirasi dan tuntutan masyarakat yang merorong pemerintah untuk menetapkan daerah-daerah otonom baru, diharapkan pemerintah dapat

mempertimbangkan untuk memberhentikan secara sementara pemekaran daerah baru karena masih banyak daerah-daerah pemekaran yang belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendekatkan layanan kepada masyarakat.

2. Pemerintah sebaiknya membenahi semua daerah-daerah pemekaran untuk dibina dan difasilitasi untuk menjadi daerah-daerah baru yang dapat secara langsung memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat agar peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dapat tercapai dengan segera agar menjadi masyarakat yang adil dan makmur
3. Pemerintah daerah yang berada pada daerah-daerah pemekaran tidak hanya memikirkan kesejahteraan dan kedudukan dari para birokrat yang ada di daerah tanpa melakukan pembenahan sistem birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya yang ada di masing-masing daerah pemekaran.
4. Pemerintah pusat dalam hal ini departemen dalam negeri dapat mengambil inisiatif untuk memperbaiki seluruh pertauran dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemekaran daerah disempurnakan sehingga setiap daerah yang ingin memekarkan daerahnya bukan hanya mendasarkan pada mendekatkan layanan kepada masyarakat, tetapi juga dibuatkan persyaratan-persyaratan yang secara konkrit dapat dipedomani oleh seluruh lapisan masyarakat.

## Referensi

- Akbar, I. 2017. Otonomi, pemekaran daerah dan masalah integrasi. Retrieved from [www.kompas.com/2/11/2022](http://www.kompas.com/2/11/2022).
- Cheema, G Shabbir and Dennis A Rondinelly. 1983. *Implementing Decentralization Policies an Introduction*. In *Decentralization and Developmen: Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills, California: Sage Publication
- Cohen, J. M., & Peterson, S. B. 1997. *Administrative Decentralization: A New Framework for Improved Governance, Accountability, and Performance*. Cambridge: Harvard Institute for International Development.
- Edwards III, George C (Edited). 1984. *Public Policy Implementing*, London, England: Jai Press Inc.----- . 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quaeterly Press.
- Hadiz, V. R. 2010. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A South East Asia Perspective*. Stanford, California: Stanford University Press.
- Izadi, Azar, Younes Jahani, Sima Rafiei, Ali Masoud, and Leila Vali. 2017. Evaluating Health Service Quality: Using Importance Performance Analysis. *International Journal of Health Care Quality Assurance* 30(7).
- Kartikasari, Dwi, Aryo Dewanto, and Fatchur Rochman. 2014. Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Dan Kepercayaan di Rumah Sakit Bunda Kandangan Surabaya. *Jurnal Aplikasi Manajemen* September.

- Kitapci, Olgun, Ceylan Akdogan, and Ibrahim Taylan Dortyol. 2014. The Impact of Service Quality Dimensions on Patient Satisfaction, Repurchase Intentions and Word of Mouth Communication in the Public Healthcare Industry. In the 2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing, vol. 148.
- Pohan, Imbalo.S., 2007. *Jaminan Mutu Layanan Kesehatan, Dasar-dasar Pengertian dan Penerapan*, EGC, Jakarta.
- Ratnawati, T., Afadlal, & Nyimas, L. L. 2009. Studi tentang pemekaran daerah: pemetaan problematika politik, ekonomi, dan sosial budaya di daerah-daerah pemekaran era reformasi: upaya menuju penyusunan konsep alternatif. Retrieved November 12, 2020
- Sutojo, Adi. 2015. Analisis Dampak Pemekaran Wilayah dalam Perspektif Otonomi Daerah (Suatu Tinjauan Empirik di Kabupaten Bengkulu Tengah). *Mimbar. Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*. ISSN: 2252-5270.
- Sutiyo, S. 2014. Decentralization: Potentially and Challenge for Rural Development. *Journal of International Development and Cooperation*, 20 (3). pp. 5-12. ISSN 1341-0903.
- Waskitawati, D. 2018. Managing wastewater in decentralized indonesia: could local democracy improve public service? *CosmoGov*, 4(2), 213. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i2.16627>
- Weick, Karl E and Quinn, Robert E. 1999. "Organizational change and development" dalam *Annual Review of Psychology*. Volume 50. p.361. Ann Arbor, Michigan 48109: University of Michigan Business School, University of Michigan.